

## **PERNYATAAN BERSAMA**

### **MENCIPTAKAN RANTAI PASOK BEBAS DEFORESTASI**

#### ***UPAYA PEMETAAN DAN PELIBATAN KELOMPOK PEMASOK***

Yang bertandatangan di bawah ini telah menetapkan dan menerapkan kebijakan '**No Deforestasi, No Gambut, No Eksploitasi**' (NDPE) selama lima tahun terakhir dalam kaitannya dengan produksi dan/atau sumber minyak kelapa sawit. Sumber daya dan investasi substansial telah dan akan terus disalurkan menuju keberhasilan penerapan kebijakan-kebijakan ini. Ruang lingkup kebijakan NDPE kami melampaui pabrik pemasok dalam rantai pasok langsung kami karena meluas ke kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit tingkat kelompok untuk perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan kami.

Kemajuan yang signifikan telah dicapai sejauh ini, dengan banyak perusahaan bergabung untuk mengadopsi kebijakan NDPE mereka sendiri; mencapai tingkat komitmen terhadap keberlanjutan oleh komoditas pertanian tunggal yang jauh melampaui yang lain. Namun, selama pelaksanaan kebijakan kami, kami ditantang oleh struktur kepemilikan yang buram yang dimiliki oleh beberapa perusahaan. Oleh karena itu, kami berupaya lebih keras untuk memetakan operasi pemasok kami untuk memastikan transparansi dan kesesuaian.

Posisi strategis pemerintah nasional atas industri minyak kelapa sawit adalah yang terpenting. Kami menyambut baik kebijakan baru-baru ini yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia, dua negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, yang membatasi ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. Pemerintah Indonesia dan Malaysia serta industri kelapa sawit menyetujui bahwa fokus utama harus pada mengintensifkan upaya untuk meningkatkan hasil daripada melalui ekspansi lahan, terutama jika hal ini melibatkan deforestasi.

Kami akan mempercepat usaha kami untuk memastikan rantai pasok bebas deforestasi dari tahun 2020 dan seterusnya. Kami akan meningkatkan keefektifan implementasi kebijakan NDPE kami sambil menangani remediasi terhadap ketidaksesuaian terhadap kebijakan NDPE kami di masa lalu. Kami terpaksa melakukannya karena kami menyadari bahwa deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit terus terjadi.

Efektif mulai Januari 2019, pemasok yang terlibat dalam deforestasi dan/atau pengembangan baru pada lahan gambut akan menghadapi penangguhan pemasokan. Namun, untuk menghindari penangguhan dari keterlibatan secara tidak sengaja berdampak pada "kebocoran pasar"<sup>1</sup> yang berkembang atau memberikan dampak negatif terhadap petani, pasca penangguhan sangatlah penting, memungkinkan kami untuk membantu pemasok dalam membawa operasi mereka menuju kesesuaian.

---

<sup>1</sup> <https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2018/05/Leakage-Refiners-CRR-020518-Final.pdf>

Kami akan terus memperkuat sistem kami untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian. Sebagai tambahan, kami menyambut dan terus menghargai masukan dari para pemangku kepentingan kami termasuk keprihatinan dan pengaduan mereka terkait ketidaksesuaian terhadap kebijakan NDPE kami.

Dengan ini kami menegaskan kembali komitmen kami untuk memutuskan hubungan antara penanaman kelapa sawit dan deforestasi, pengembangan lahan gambut, dan konflik sosial. Karena itu kami berkomitmen untuk mengejar tindakan-tindakan berikut:

#### 1. [Menggalakkan Kebijakan NDPE Kepada Supplier](#)

Kebijakan NDPE Wilmar berlaku untuk para pemasok kami pada tingkat grup sejak diluncurkannya pada bulan Desember 2013. Mulai Januari 2019, kami akan meminta para pemasok kami di tingkat grup untuk menyediakan konfirmasi tertulis mengenai komitmen mereka untuk mematuhi kebijakan NDPE kami pada kuartar pertama 2019, kecuali mereka memiliki kebijakan NDPE umum yang dapat diterima (lihat Lampiran 2).

Bulan Januari 2019 juga merupakan saat di mana kami mulai memberlakukan pendekatan pengaduan baru kami, “Tangguhkan dan Libatkan” atas dasar bukti deforestasi atau pengembahan lahan gambut yang dilakukan oleh pemasok kami di tingkat grup terhitung mulai 1 Januari 2019. Hal ini selaras dengan dan didukung oleh kebijakan pemerintah Indonesia<sup>2</sup> dan Malaysia<sup>3</sup> serta moratorium tentang ekspansi minyak kelapa sawit.

Sejak bulan Mei 2018, penyediaan peta tingkat grup telah menjadi kondisi perdagangan bagi semua pemasok baru untuk memungkinkan pemantauan yang komprehensif terhadap potensi ketidaksesuaian terhadap kebijakan NDPE. Pada akhir 2019, pemetaan terhadap semua pemasok sepanjang rantai pasok kami akan lengkap, dan proses ini akan dimulai melalui proses konfirmasi peta di awal kuartar kedua 2019 (lihat Lampiran 2 untuk prosedur konfirmasi). Semua peta akan diunggah ke dalam platform pemetaan kelompok pemasok Aidenvironment (lihat Lampiran 1). Kegagalan dalam mematuhi atau bekerja sama dalam proses ini akan memicu Prosedur Pengaduan.

Pada kuartar pertama 2019, khusus pada kasus-kasus di bawah pendekatan “Tangguhkan dan Libatkan”, kami akan menerbitkan Protokol Keterlibatan Ulang untuk menetapkan proses yang dibatasi waktu pemasok yang telah ditangguhkan, termasuk syarat dan ketentuan untuk melanjutkan pasokan. Ini akan dikelola oleh sebuah sistem untuk memastikan bahwa para pemasok ini tidak akan bergabung kembali dalam rantai pasok jika Protokol Keterlibatan Ulang belum terpenuhi.

#### 2. [Pemetaan Pemasok Pada Tingkat Grup](#)<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/widodo-signs-moratorium-on-new-palm-oil-plantations-in-indonesia/item8978>

<sup>3</sup> <https://www.malaymail.com/s/1669208/teresa-kok-govt-to-stop-oil-palm-expansion-keep-50pc-land-as-forest>

<sup>4</sup> Pemasok tingkat grup berdasarkan pada [definisi “grup” oleh RSPO](#). Lebih dari itu, interpretasi nasional akan berlaku di area masing-masing.

Kami mendukung pengembangan basis data pemetaan kelompok pemasok minyak kelapa sawit yang komprehensif di bawah Program Kesesuaian Kelompok Pemasok Aidenvironment. Dengan dimilikinya tingkat cakupan peta yang luas di Indonesia dan Malaysia, Aidenvironment akan melanjutkan identifikasi seluruh peta kepemilikan lahan (konsesi) dari kelompok pemasok kami termasuk di daerah penghasil minyak kelapa sawit lainnya.

Basis data pemetaan akan memungkinkan kami untuk memantau aktifitas pengembangan lahan pemasok kami, jika ada, menggunakan detil peta tutupan hutan dan lahan gambut dengan citra satelit resolusi tinggi. Peta-peta tersebut akan mencakup atribut utama seperti tautan tingkat grup, nama anak perusahaan, kapasitas pabrik, ketersediaan kepemilikan lahan, serta komitmen tertulis atau umum terhadap kebijakan NDPE.

Peta yang berlaku untuk rantai pasok kami dapat diakses oleh pihak-pihak terkait untuk menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan ketidaksesuaian operasi kami dan/atau pemasok kami (lihat Lampiran 1).

### [3. Menyampaikan Pesan Ketidakpatuhan melalui Rencana Perbaikan](#)

Kami mengakui bahwa membangun sebuah rantai pasok bebas deforestasi dari 2020 kedepannya membutuhkan penyediaan langkah-langkah remediasi, yang juga dikenal sebagai Rencana Pemulihan, untuk ketidakpatuhan di masa lalu terkait dengan deforestasi dan pembangunan gambut. Mengadopsi tanggal batas waktu konversi 31 Desember 2015 untuk menentukan tingkat ketidakpatuhan, kami akan mengembangkan peta dasar tutupan hutan dan lahan gambut untuk tahun 2016 dan seterusnya, dimulai dengan Indonesia dan Malaysia yang diperkirakan akan selesai di 2019.

Untuk kasus-kasus yang terkait dengan deforestasi dan/atau pengembangan baru gambut setelah 1 Januari 2019, tantangan terhadap peta dasar dan/atau pengembangan kelapa sawit yang tidak sesuai hanya dapat dilakukan melalui Penilaian bersama HCV-HCS menggunakan metodologi terintegrasi yang didefinisikan dalam HCSA Toolkit ( Tantangan-tantangan untuk kasus antara 1 Januari 2016 dan 31 Desember 2018 lihat Lampiran 2).

Sebelum akhir 2019, pemasok yang relevan yang sudah ada dalam daftar kasus pengaduan akan diminta menyerahkan Rencana Pemulihan mereka sesuai dengan skala ketidaksesuaian pengembangan mereka. Rencana pemulihan dapat mencakup opsi melindungi dan memulihkan hutan, lahan kosong dan/atau rawa gambut dan untuk membantu masyarakat setempat mengamankan hak kehutanan social. Tindakan perbaikan yang sudah diambil akan menjadi bagian Rencana Pemulihan, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam basis data pemetaan.

Kami akan berkontribusi pada kolaborasi lintas industri berpartisipasi aktif untuk mengembangkan pedoman perbaikan atau restorasi industry yang diakui di industry dan praktik terbaik. Selain itu, kami juga akan mendukung rencana aksi terintegrasi yang dirancang untuk memperkuat upaya konservasi hutan, terutama melalui program tingkat lansekap dan program masyarakat dan petani, diantara yang lainnya.

#### 4. Mendukung Petani

Sembari berjuang untuk meningkatkan akuntabilitas, kami sebagai perusahaan yang bertanggungjawab dan, juga bekerja untuk memenuhi komitmen NDPE kami tentang “No Deforestation” dan ‘No Lahan gambut’, kami juga harus memastikan bahwa upaya kami tidak berdampak negative terhadap petani kecil.

Kami akan mendukung pemetaan petani kebun kelapa sawit mandiri di Indonesia dan Malaysia, yang banyak diantaranya terkait dengan pabrik independent dalam rantai pasok kami, menggunakan citra satelit resolusi tinggi. Lebih lengkap lihat Lampiran 1.

#### 5. Perkembangan Laporan Publik

Mulai Q1 2019, Daftar Pengaduan publik kami akan diperluas untuk memasukkan semua kasus ketidakpatuhan yang sedang berjalan, termasuk yang diidentifikasi melalui proses internal monitoring kami. Setiap kasus yang terekam akan dibuat tindakan rencana kerja waktu secara khusus bagi pemasok untuk tetap atau memasuki kembali rantai pasok kami. Dari Q2 2019 dan seterusnya, kami akan melaporkan dengan jelas informasi tentang kemajuan grup pemasok kami berkaitan dengan:

- Ketersediaan konfirmasi tertulis terhadap kepatuhan kebijakan NDPE kami atau komitmen public terhadap kebijakan NDPE
- Keakuratan peta konsesi yang diserahkan dan diperbaharui pada basis data pemetaan grup
- Sisa hutan dan lahan gambut yang belum dikembangkan dalam perusahaan grup pemasok
- Penampilan pada Daftar Keluhan untuk pemasok di tingkat grup

Kami akan mulai menyajikan tinjauan dan materi terkait pada persentase minyak sawit yang bersumber dari pemasok yang seluruh operasinya telah diverifikasi secara independen agar sesuai dengan kebijakan NDPE kami. Informaasi dan angka ini juga akan tercermin dalam Laporan *Sustainability* kami dari tahun 2019 dan seterusnya.

#### 6. Tanggung jawab Bersama

Upaya kami sendiri tidak akan cukup jika kita menjaga suhu global naik diatas 1.5°C, dan jika kami menciptakan deforestasi dan rantai pasok bebas konflik. Kami memiliki tanggung jawab bersama dengan pemain industry hulu dan hilir serta perusahaan barang konsumsi dan LSM untuk memprioritaskan perlindungan hutan di pusat operasi kami.

#### Kesimpulan

Kami akan membuat kemajuan dalam menggerakkan industry melalui penerapan control yang lebih ketat ini. Namun, upaya kami mungkin terus dilemahkan oleh “Leakage market” yang berkembang dimana para

pemasok dan pedagang yang salah terus menolak kebutuhan untuk berubah karena menghadapi tekanan terbatas setelah ditempatkan diluar lingkup pengaruh kami.

Jadi, kami menyerukan kepada LSM bersama dengan pemain industry hilir lainnya untuk mempercepat tekanan pada pemasok yang tidak sesuai untuk berkomitmen dan menerapkan kebijakan NDPE. Hanya melalui tindakan kolaboratif dan multi-pihak yang dapat memastikan bahwa seluruh industry kelapa sawit bergerak menuju komitmen dan tujuan keberlanjutan jangka panjang yang akan menghasilkan rantai pasokan bebas deforestasi yang terjamin.

**Penandatanganan Utama:**

	
<b>Kuok Khoon Hong</b> CEO & Chairman Wilmar International Limited	<b>Eric Wakker</b> Co-Founder Aidenvironment Asia

**Penandatanganan pendukung:**

<b>Dhaval Buch</b> Chief Procurement Officer Unilever	<b>Mark Dady</b> Chief Procurement Officer Mondelez International
---	---

Lampiran 1: Platform Pemetaan Grup Pemasok

Para penandatangan pernyataan bersama akan menggunakan Aidenvironment untuk mengembangkan dan memelihara platform pemetaan grup pemasok sebagai bagian dari *Supplier Group Compliance Program* (SGCP).

Platform pemetaan grup pemasok akan berisi data komprehensif terkait pemasok kelapa sawit, baik di dalam maupun di luar rantai pasok perusahaan dengan kebijakan NDPE, termasuk batas-batas kepemilikan lahan di perkebunan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan dan hubungan di antara mereka. Pelanggan platform akan dapat mengunduh profil kinerja keberlanjutan pemasok dan proses monitor secara real-time serta upaya pengembangan lahan dan konservasi di wilayah kepemilikan lahan pemasok. Selain itu, terdapat komponen yang interaktif dalam system yang memungkinkan pelanggan untuk mengajukan pertanyaan dan menyarankan perbaikan.

Beberapa lapisan yang akan diunggah di Platform Pemetaan adalah sebagai berikut:

- **Profil grup pemasok**, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - Nama anak perusahaan dan pemegang saham induk perusahaan
  - Lokasi pabrik dan kilang (refinery) dan kapasitas pemrosesan yang tersedia (tersedia untuk umum)
  - Total kepemilikan lahan dan lokasi beroperasi
  - Komitmen terhadap kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, dan Nol Eskloitasi (NDPE)
  - Penanganan keluhan
  - Hasil nyata dari komitmen NDPE perusahaan dan kisah di baliknya
  
- **Batas kepemilikan lahan**, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - Peta konsesi terkait dengan izin yang dikeluarkan di tingkat nasional dan regional termasuk izin pelepasan hutan atau area survey EIA
  - Batas luar area perkebunan di bawah hak guna lahan yang dipegang oleh perusahaan pemasok kelapa sawit
  - Area penanaman milik perusahaan, lokasi keberadaan di luar batas hak guna lahan
  - Area penanaman milik petani independen (tanpa nama), tanpa batas-batas individu
  
- **Area Minat untuk Konservasi, Pemulihan, dan Keadilan Sosial:**
  - Baseline (2016) tutupan hutan dan peta lahan gambut Indonesia dan Malaysia untuk memungkinkan proses pemantauan terhadap tanggal cut-off yang disetujui pada 31 Desember 2015
  - Sisa area berpotensi dengan cadangan karbon tinggi (hutan dan gambut yang belum dikembangkan) dan area dimana ekspansi perkebunan kemungkinan akan terjadi di masa depan
  - Batas-batas yang ada untuk penetapan HCV dan HCS yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi (berdasarkan ketersediaan laporan ringkasan penilaian HCV-HCSA publik dalam domain publik)

- Status hutan berdasarkan versi terbaru yang tersedia yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan terkait
  
- **Lapisan Citra Satelit:**
  - Citra satelit dengan resolusi tinggi yang diperbaharui setiap hari pada area tertentu (kasus ketidaksesuaian)
  - Analisis spasial hutan dan hilangnya gambut dalam konsesi kelapa sawit pada skala 1 : 5000 mulai dari tahun 2016 dengan pembaharuan setiap tahunnya
  
- **Data Rantai Pasok:**
  - Status pasokan tersertifikasi dari masing-masing pabrik (RSPO, MSPO, ISPO)
  - Hubungan di antara grup pemasok, yaitu pabrik dan list pembeli, berdasarkan daftar pemasok yang tersedia serta data ekspor-impor
  - Catatan: data komersil yang berhubungan dengan nilai dan volume tidak akan dimasukkan ke dalam platform.

Platform Pemetaan Grup Pemasok akan dirancang dan diujicobakan pada Q1-2019 serta diperluas lebih lanjut sepanjang 2019, dan akan terus diperbaharui pada tahun-tahun berikutnya. Supplier Group Compliance Program (SGCP) dari Aidenvironment ini akan menyampaikan masukan yang dibutuhkan untuk Konfirmasi Peta Pemasok dan Prosedur Penilaian Risiko selama proses desain dan uji coba program Platform Pemetaan Grup Pemasok.

Pengembangan dan pemeliharaan Platform Pemetaan Grup Pemasok akan diawasi oleh Kelompok Pengarah yang terdiri atas tidak lebih dari lima perwakilan Industri Barang Konsumen dan Industri Pabrik Makanan (CGFM), *trader-refiner*, masyarakat sipil dan petani.

Akses dan penggunaan data yang diunggah pada Platform Pemetaan Grup Pemasok akan tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir

Lampiran 2 Prosedur Konfirmasi Pemasok

Garis besar prosedur Konfirmasi Pemasok dibawah akan digunakan untuk melibatkan penerima manfaat terakhir dari grup perusahaan dalam rantai pasok kami:

**a) Menandatangani komitmen untuk mematuhi kebijakan NDPE kami**

Pada Q1-2019, pemasok akan diminta menyatakan komitmen mereka secara tertulis untuk memenuhi kebijakan NDPE kami kecuali jika mereka telah memiliki kebijakan NDPE yang dapat diterima publik. Mengikuti hal tersebut, kami akan:

- Meninjau penerimaan kebijakan NDPE yang dapat diakses publik
- Mengidentifikasi grup – grup tanpa peraturan
- Menyurati serta meminta grup – grup tersebut untuk mengkonfirmasi komitmen mereka secara tertulis yaitu kesediaan mematuhi kebijakan NDPE kami
- Meninjau tanggapan dan menindaklanjuti prosedur keluhan, jika dibutuhkan

**b) Keakuratan dan kelengkapan dari peta kepemilikan lahan grup pemasok**

Selama Q2 dan Q3- 2019, grup pemasok akan diminta untuk meninjau, mengkonfirmasi kebenaran atau menyesuaikan daftar aset perkebunan dan disesuaikan dengan peta kepemilikan lahan yang dimiliki dan atau dikelola oleh grup tersebut, sesuai dengan hal- hal berikut:

- Pada Q1-2019, Aidenvironment akan mendampingi kami mengembangkan pedoman internal secara jelas dalam menginterpretasi peraturan dan undang- undang yang berkaitan dengan grup perusahaan dan penerima manfaat terakhir. Kami akan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan eksternal dan menjelaskan interpretasi kami.
- Aidenvironment akan mendampingi kami dalam mempersiapkan daftar aset perkebunan dan disesuaikan dengan kepemilikan lahan untuk setiap grup pemasok. Informasi ini, sejalan dengan area yang teridentifikasi dan sisa hutan dan gambut dan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan batas tanggal 31 Desember 2015, akan ditampilkan kepada grup pemasok untuk ditinjau dan dikonfirmasi.
- Peta yang ditampilkan dan diberikan kepada pemasok diasumsikan benar jika tanggapan tidak diterima dalam kurun waktu dua bulan, apabila dikemudian hari ditemukan informasi tersebut tidak benar atau tidak lengkap setelah batas waktu yang ditentukan, maka Prosedur Keluhan kami akan diberlakukan.
- Pemasok yang ingin menguji penilaian ketidakpatuhan dapat menggunakan metodologi pendekatan HCV-HCS dan *Toolkit*<sup>5</sup> HCSA. Setiap HCV-HCSA yang disetujui ditinjau oleh Wilmar dan mitra pelaksana.

---

<sup>5</sup> Tautan: <https://rspo.org/key-documents/supplementary-materials>

- Pemasok yang menginformasikan kepada kami bahwa mereka kekurangan sumber daya atau kompetensi untuk memenuhi permintaan kami akan diberikan dukungan teknis.
- Pemasok yang hanya mengoperasikan pabrik independent (tanpa kepemilikan atau manajemen kepemilikan lahan) akan dilibatkan melalui strategi khusus.

**c) Kesiadaan untuk memberikan Rencana Pemulihan**

Grup – grup pemasok yang tidak berkesesuaian pada pembukaan lahan hutan dan pengembangan lahan gambut setelah batas tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan 01 Januari 2019 diwajibkan untuk memberikan Rencana Pemulihan yang sepadan dengan skala pengembangan ketidaksesuaian:

- Pada awal Q1-2019, Wilmar akan bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan untuk mengembangkan panduan dan kriteria teknis Rencana Pemulihan yang dapat diterima
- Pada Q2 dan Q3-2019, Aidenvironment akan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan mempersiapkan temuan – temuan untuk dikonfirmasi kepada pemasok kami
- Pemasok yang mengkonfirmasi ketidaksesuaian – ketidaksesuaian tersebut diminta untuk memberikan Rencana Pemulihan mereka pada Q4-2019
- Pemasok yang ingin menguji penilaian ketidaksesuaian dapat melakukannya dengan memberikan hasil tinjauan HCV dan atau penilaian HCS kelompok mereka. Dalam kasus yang berhubungan dengan lahan gambut, peta tanah yang cukup detail akan dijadikan referensi. Jika dokumen ini tidak tersedia, mereka akan diminta untuk memberikan *Land Use Change Assessment (LUCA)*<sup>6</sup>, mengikuti metodologi RSPO, akan ditinjau oleh Wilmar dan atau mitra pelaksana.
- Sebelum akhir 2019, pemasok terkait yang sudah terdaftar pada kasus keluhan akan diminta untuk memberikan Rencana Pemulihan yang sepadan dengan skala pengembangan ketidaksesuaian mereka.
- Pemasok yang tidak bersedia berkomitmen untuk memberikan Rencana Pemulihan mereka akan dimasukkan pada Prosedur Keluhan

Penilaian resiko akan diterapkan pada setiap langkah konfirmasi dan seterusnya, untuk memastikan bahwa sumber daya kami terfokus pada kasus – kasus beresiko tinggi.

---

<sup>6</sup> Tautan: <https://rspo.org/key-documents/supplementary-materials>